

## Pengaruh Modal Sosial terhadap Pendampingan Perhutanan Sosial di Provinsi Maluku

Bambang Supriyanto<sup>1\*</sup>, Hasnawir<sup>2</sup>, Irsan Nuryanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Jakarta; Universitas Nusa Bangsa, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Jakarta; Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Graduate School of Environmental and Life Sciences, Okayama University, Okayama, Japan

\*Email: [bambang\\_halimun@yahoo.com](mailto:bambang_halimun@yahoo.com)

**ABSTRACT:** *Social forestry is a sustainable forest management system as one of the Government's programs in the context of economic equality and reducing poverty levels with a forest target of 12.7 million hectares to be managed by the community. One of the keys to the success of the social forestry program is the availability of social forestry facilitators to facilitate the three social forestry governance systems, namely institutional governance, regional governance, and business governance. The success of social forestry facilitation is not only determined by the quantity of facilitators, but also by the quality of the facilitators. This study aimed to determine the influence of social capital on social forestry facilitation in Maluku Province. A total of 33 facilitators filled out a questionnaire covering three main elements of social capital, namely trust, social networks, and social norms with data analysis using a Likert scale. The results showed that the index number was 91,69% and could be classified in the high assessment category with a total score of 1,180. This shows that social capital has an important role in facilitating social forestry in Maluku Province. Thus, the application of good social capital will be able to empower the community and be very influential in the success of social forestry facilitation.*

**Keywords:** *Social Forestry, Facilitator, Social Capital, Maluku*

DOI: 10.24259/jhm.v15i1.26059

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi atau KPE untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. Kebijakan pemerataan ekonomi ini bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan kapasitas sumber daya manusia. Program perhutanan sosial merupakan salah satu dari bagian penjabaran dari pilar kebijakan pemerataan ekonomi secara khusus pada lahan (PSKL, 2020).

Perhutanan sosial dikenal sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama merupakan salah satu upaya dalam rangka pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan (A Zulkarnain, 2021). Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sekitar 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan 36,7% termasuk kategori miskin (KLHK, 2022). Sebagai tindak lanjut program perhutanan sosial, Pemerintah menetapkan target luas capaian perhutanan sosial 12,7 juta hektare atau 10% dari

120,7 Juta hektare luas hutan di Indonesia untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Capaian luas hingga akhir bulan Desember 2022 telah mencapai 5,3 Juta hektare yang didistribusikan sebanyak 8.041 unit SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang meliputi  $\pm$  1,1 Juta Kepala Keluarga (KK).

Salah satu kunci keberhasilan program perhutanan sosial adalah ketersediaan pendamping perhutanan sosial dalam mendukung kemandirian kelompok untuk mencapai tujuan perhutanan sosial yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pendampingan dapat dilaksanakan pra dan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pendampingan pra persetujuan dibutuhkan dalam percepatan capaian akses legal perhutanan sosial, sedangkan pendampingan pasca persetujuan dibutuhkan dalam percepatan pengelolaan perhutanan sosial meliputi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, dan tata kelola usaha. Pentingnya pendamping perhutanan sosial, sehingga dalam penetapannya seorang pendamping harus memiliki 3 (tiga) standar kompetensi yaitu: kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi umum.

Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi yang menjadi lokasi pelaksanaan program perhutanan sosial dengan areal indikatif perhutanan sosial seluas 230.888 hektare. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial hingga Desember 2022 seluas 197.221 hektare, yang terdiri dari 146 unit SK persetujuan dengan melibatkan 31.497 KK. Kondisi menunjukkan bahwa dengan berbagai keterbatasan, pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku sebanyak 33 orang dengan jumlah SK Persetujuan yang didampingi sebanyak 91 unit SK dengan luas total 78.784 hektare. Hal ini berarti bahwa seorang pendamping rata-rata mendampingi 2 sampai 3 unit SK persetujuan dengan rata-rata luas yang didampingi 2.387 hektare. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jumlah pendamping masih jauh dari target yang diharapkan Pemerintah dengan kondisi ideal 1 unit SK didampingi oleh 1 orang pendamping perhutanan sosial. Sumber pendamping terdiri dari berbagai pihak, baik dari ASN maupun Non ASN dan juga mempertimbangkan pengarusutamaan gender.

Keberhasilan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh kuantitas pendamping, akan tetapi ditentukan pula dari kualitas pendamping (PSKL, 2020). Moda sosial diyakini menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang pendamping untuk

menunjukkan tingkat kualitas dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan perhutanan sosial. Modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain. Kondisi melemahnya ikatan sosial berarti menandakan melemahnya modal sosial. Dengan melemahnya ikatan sosial, dapat dipastikan bahwa kerja sama sosial akan terhambat. Implikasi dari kerja sama sosial yang terhambat adalah sulit mengembangkan modal sosial. Untuk itulah, diperlukan upaya dalam menumbuhkan lingkungan yang inklusif. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif sangat dibutuhkan modal sosial. Konsep modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerja sama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut (Fathy, 2019). Modal sosial telah digambarkan sebagai tingkat kecenderungan altruistik dan tingkat saling percaya antara orang-orang dalam suatu komunitas. Dalam beberapa penelitian dikemukakan bahwa modal sosial sebagai sumber daya berharga yang membuka akses ke berbagai sumber daya lain (Mahfud et al., 2020). Unsur-unsur pokok dari modal sosial terdiri atas: kepercayaan atau *trust*, jaringan sosial atau *social networks*, dan norma sosial atau *social norms* (Rumagit et al., 2019; Ainiyah et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap pendampingan perhutanan sosial, terkait 3 unsur pokok yaitu kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial di Provinsi Maluku.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Lokasi penelitian di Provinsi Maluku dengan fokus pada 33 pendamping pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial tahun 2022, yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota yaitu: Buru, Buru Selatan, Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Tual (Gambar 1 dan Tabel 1). Lokasi penelitian di Provinsi Maluku dinilai menjadi perwakilan kondisi pendampingan di wilayah kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Maluku-Papua. Modal sosial pendamping perhutanan sosial menentukan kinerja pelaksanaan

pendampingan di lokasi penelitian. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dalam mengetahui kondisi modal sosial yang dimiliki oleh para pendamping perhutanan saat ini.

Provinsi Maluku adalah provinsi yang memiliki sejumlah pulau sekitar 1.340 dengan luas wilayah 712.479,69 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut sebagian besar merupakan perairan seluas 658.331,52 Km<sup>2</sup>. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota dengan kabupaten terluas adalah Kabupaten Kepulauan Aru dengan luas 8.152,42 km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kabupaten Maluku Tengah dengan luas 7.953,81 km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas wilayah sebesar 6.429,88 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data tahun 2019, jumlah mencapai sekitar 1.749.529 jiwa (BPS, 2020). Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 adalah 3.919.617 Ha atau 81% dari luas daratan. Kawasan hutan ini terdiri dari hutan Konservasi seluas 429.538 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.256 Ha (16,01%), Hutan Produksi Terbatas 894.258 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 643.699 Ha (16,42%) dan Hutan Produksi Konversi 1.324.866 Ha (33,80%). Luas dan jenis hutan yang beragam di Provinsi Maluku ini menjadi tantangan di mana modal sosial pendamping perhutanan sosial sangat menentukan pelaksanaan pendampingan di tingkat tapak.



Gambar 1. Lokasi Penelitian di Provinsi Maluku

**Tabel 1.** Distribusi pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping
1	Buru	1
2	Buru Selatan	4
3	Ambon	3
4	Maluku Tengah	5
5	Maluku Tenggara	3
6	Seram Bagian Barat	12
7	Seram Bagian Timur	4
8	Tual	1
Total		33

**Sumber:** PSKL, 2022

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disampaikan kepada seluruh pendamping perhutanan sosial yang ditetapkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku-Papua pada tahun 2022. Jumlah pendamping ini sebanyak 33 orang yang tersebar pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Kuesioner dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan sosial terkait 3 unsur pokok dari modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial (Ainiyah et al., 2020). Penilaian unsur pokok dari modal sosial terdiri dari (Rumagit et al., 2019):

### 1) Kepercayaan, diukur dengan:

- a Hubungan sosial: saling percaya antara sesama pendamping; ada saling percaya antara pendamping dengan KPS yang didampingi.
- b Harapan: pendamping memiliki sikap yang jujur; kerja sama yang baik antara sesama pendamping.
- c Interaksi sosial: saling memberikan pendapat atau masukan terhadap sesama pendamping, memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain.
- d Hubungan sosial: saling percaya antara sesama pendamping; ada saling percaya antara pendamping dengan KPS yang didampingi.
- e Harapan: pendamping memiliki sikap jujur; kerja sama yang baik antara sesama pendamping.

f Interaksi sosial: saling memberikan pendapat atau masukan terhadap sesama pendamping; memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain.

2) Norma, diukur dengan:

- a Peraturan: memiliki sifat taat terhadap aturan; tidak berlaku curang
- b Keadilan: berlaku adil pada sesama pendamping; berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi.

3) Jaringan Sosial, diukur dengan:

- a. Komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi
- b. Komunikasi yang baik dengan pemerintah, swasta dan lainnya
- c. Saling membantu dengan pendamping lainnya

Tiga unsur modal sosial yang dijabarkan melalui pertanyaan dalam kuesioner ditetapkan batasan tingkat modal sosial yang dimiliki oleh pendamping yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, laporan penelitian, dan publikasi dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta sumber informasi lainnya seperti jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

### 2.3 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan skala likert (likert scale), yaitu suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei yang dikembangkan oleh Rensis Likert tahun 1932 (Suwandi et al., 2018), dimana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Hasil Pengumpulan Data}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Nilai skor:

T	=	Tinggi Skor	=	3	Indeks = 0% –	33,33% = Rendah
S	=	Sedang Skor	=	2	Indeks = 33,34% –	66,66% = Sedang
R	=	Rendah Skor	=	1	Indeks =66,67%	– 100% = Tinggi

Dengan cara perhitungan skor:

Skor Tiap Kriteria = Capaian Skor x Jumlah Responden

$$S3 = 3 \times 33 = 99$$

$$S2 = 2 \times 33 = 66$$

$$S1 = 1 \times 33 = 33$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kondisi Umum Pendamping dan Lokasi Perhutanan Sosial

Pendamping perhutanan sosial (pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial) secara umum memiliki tugas pendampingan dalam tiga tata kelola yaitu: pendampingan tata kelola kelembagaan; pendampingan tata kelola kawasan; dan pendampingan tata kelola usaha. Di Provinsi Maluku, pendamping perhutanan sosial sekitar 57,58% berstatus sebagai ASN sedangkan 42,42% Non ASN. ASN ini umumnya merupakan penyuluh kehutanan yang ada di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) atau Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Status pendamping ASN dengan presentase yang lebih tinggi umumnya memiliki tingkat modal sosial yang lebih baik dari Non ASN. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pendamping berdasarkan jenis kelamin tidak terlalu jauh berbeda, dimana laki-laki sebanyak 18 orang (54,55%) sedangkan pendamping perempuan sebanyak 15 orang (45,45%).

**Tabel 2.** Jumlah pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku berdasarkan gender

No.	Kabupaten/Kota	Gender		Jumlah Pendamping
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Buru	1	-	1
2	Buru Selatan	1	3	4
3	Ambon	1	2	3
4	Maluku Tengah	4	1	5
5	Maluku Tenggara	2	1	3
6	Seram Bagian Barat	6	6	12
7	Seram Bagian Timur	3	1	4
8	Tual	-	1	1
Total		18	15	33

**Sumber:** PSKL, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku berdasarkan tingkat pendidikan 100% adalah Sarjana (S1), sedangkan berdasarkan usia rata-rata pendamping adalah 36 tahun. Dengan tingkat pendidikan sarjana dan usia yang relatif masih muda ini, memberikan pengaruh positif pada tingkat modal sosial yang dimiliki oleh pendamping.

**Tabel 3.** Jumlah pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku berdasarkan tingkat pendidikan dan usia rata-rata

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan		Usia Rata-Rata
		SLTA	Sarjana (S1)	
1	Buru	-	1	38
2	Buru Selatan	-	4	32
3	Ambon	-	3	39
4	Maluku Tengah	-	5	37
5	Maluku Tenggara	-	3	41
6	Seram Bagian Barat	-	12	35
7	Seram Bagian Timur	-	4	34
8	Tual	-	1	29
Total		0	33	

**Sumber:** PSKL, 2022

Pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku sebanyak 33 orang yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan total Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang didampingi sebanyak 91 kelompok. Pendamping ini tersebar pada 74 desa/kelurahan di 8 kabupaten/kota dengan luas areal perhutanan sosial 78.784 Hektare. Dari luasan tersebut dibagi dalam 44 skema Hutan Kemasyarakatan (48,35%), 43 skema Hutan Desa (47,25%) dan 4 skema Hutan Adat (4,40%). Luas dengan keragaman skema perhutanan sosial yang didampingi menunjukkan tantangan dalam pendampingan semakin tinggi dan beragam. Dengan demikian, diperlukan modal sosial yang lebih baik dari pendamping perhutanan sosial.



**Gambar 2.** Pendampingan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial dengan produk minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat

### 3.2 Pengaruh Modal Sosial dalam Pendampingan Perhutanan Sosial

#### 3.2.1 Kepercayaan

##### 3.2.1.1 Saling Percaya Antar Sesama Pendamping

Tabel 4 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $99/99 \times 100 = 100\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping saling percaya antara sesama pendamping tergolong tinggi.

**Tabel 4.** Saling percaya antara sesama pendamping

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	30	100	99
2	Sedang	2	-	-	-
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	99

**Sumber:** Data primer, 2022

##### 3.2.1.2 Saling Percaya Antar Pendamping dengan KPS yang didampingi

Tabel 5 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $97/99 \times 100 = 97,98\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping saling percaya antara sesama pendamping dengan KPS tergolong tinggi.

**Tabel 5.** Saling percaya antara pendamping dengan KPS yang didampingi

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	32	96,97	96
2	Sedang	2	1	3,03	2
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	97

**Sumber:** Data primer, 2022

##### 3.2.1.3 Pendamping Memiliki Sikap yang Jujur

Tabel 6 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $99/99 \times 100 = 100\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping memiliki sikap jujur tergolong tinggi.

**Tabel 6.** Pendamping memiliki sikap yang jujur

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	33	100	99
2	Sedang	2	-	-	-
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	99

Sumber: Data primer, 2022

### 3.2.1.4 Kerja Sama yang Baik Antar Sesama Pendamping

Tabel 7 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $93/99 \times 100 = 93,94\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping memiliki kerja sama yang baik antara sesama pendamping tergolong tinggi.

**Tabel 7.** Kerja sama yang baik antara sesama pendamping

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	27	87,10	81
2	Sedang	2	6	12,90	12
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	93

Sumber: Data primer, 2022

### 3.2.1.5 Saling Memberikan Pendapat atau Masukan Terhadap Sesama Pendamping

Tabel 8 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $63/99 \times 100 = 63,63\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping saling memberikan pendapat atau masukan terhadap sesama pendamping tergolong sedang.

**Tabel 8.** Saling memberikan pendapat atau masukan terhadap sesama pendamping

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	4	19,05	12
2	Sedang	2	22	69,84	44
3	Rendah	1	7	11,11	7
Total			33	100	63

Sumber: Data primer, 2022

### 3.2.1.6 Memiliki Sifat Terbuka Satu dengan yang lain

Tabel 9 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal yaitu:  $87/99 \times 100 = 87,88\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain tergolong tinggi.

**Tabel 9.** Memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	21	72,41	63
2	Sedang	2	12	27,59	24

3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	87

**Sumber:** Data primer, 2022

### 3.2.2 Norma

#### 3.2.2.1 Memiliki Sifat Taat Terhadap Aturan

Tabel 10 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $97/99 \times 100 = 97,98\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping memiliki sifat taat terhadap aturan tergolong tinggi.

**Tabel 10.** Memiliki sifat taat terhadap aturan

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	31	96,88	93
2	Sedang	2	2	3,12	4
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	97

**Sumber:** Data primer, 2022

#### 3.2.2.2 Tidak Berlaku Curang

Tabel 11 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $99/99 \times 100 = 93,94\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping tidak berlaku curang tergolong tinggi.

**Tabel 11.** Tidak berlaku curang

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	33	100	99
2	Sedang	2	-	-	-
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	99

**Sumber:** Data primer, 2022

#### 3.2.2.3 Berlaku Adil pada Sesama Pendamping

Tabel 12 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $98/99 \times 100 = 98,99\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping berlaku adil pada sesama pendamping tergolong tinggi.

**Tabel 12.** Berlaku adil pada sesama pendamping

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase	Total
----	--------------------	------	--------	------------	-------

			Responden	(%)	
1	Tinggi	3	32	96,97	96
2	Sedang	2	1	3,03	2
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	98

**Sumber:** Data primer, 2022

#### 3.2.2.4 Berlaku Adil pada Anggota Kelompok yang didampingi

Tabel 13 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $98/99 \times 100 = 98,99\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi tergolong tinggi.

**Tabel 13.** Berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	32	96,97	96
2	Sedang	2	1	3,03	2
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	98

**Sumber:** Data primer, 2022

#### 3.2.3 Jaringan Sosial

##### 3.2.3.1 Komunikasi yang Baik dengan Kelompok yang didampingi

Tabel 14 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $89/99 \times 100 = 89,90\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping memiliki komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi.

**Tabel 14.** Komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	23	77,53	69
2	Sedang	2	10	22,47	20
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	89

**Sumber:** Data primer, 2022

##### 3.2.3.2 Komunikasi yang Baik dengan pemerintah, Swasta dan Lainnya

Tabel 15 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $64/99 \times 100 = 64,65\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah, swasta dan lainnya tergolong tinggi.

**Tabel 15.** Komunikasi yang baik dengan pemerintah, swasta dan lainnya

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase, %	Total
1	Tinggi	3	6	28,12	18
2	Sedang	2	19	59,38	38
3	Rendah	1	8	12,50	8
Total			33	100	64

**Sumber:** Data primer, 2022

### 3.2.3.3 Saling Membantu dengan Pendamping Lainnya

Tabel 16 menunjukkan bahwa berdasarkan 33 responden dapat dihitung persentase dari skor hasil pengumpulan data dengan skor ideal adalah  $97/99 \times 100 = 97,89\%$ . Hal ini berarti bahwa pendamping saling membantu dengan pendamping lainnya tergolong tinggi.

**Tabel 16.** Saling membantu dengan pendamping lainnya

No	Alternatif Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)	Total
1	Tinggi	3	31	96,88	93
2	Sedang	2	2	3,12	4
3	Rendah	1	-	-	-
Total			33	100	97

**Sumber:** Data primer, 2022

Ringkasan dari pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku ditunjukkan pada Tabel 17. Berdasarkan 33 responden dengan 13 indikator, modal sosial belum sepenuhnya diterapkan secara optimal oleh pendamping atau masih ada indikator modal sosial yang diterapkan dengan kategori sedang (33-67). Namun demikian, hasil responden ini telah menunjukkan bahwa pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan sosial termasuk kategori penilaian tinggi dengan skor total 1.180.

**Tabel 17.** Ringkasan pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku

Unsur	Indikator	Nilai	Keterangan	Kesimpulan
Kepercayaan	1. Saling percaya antara sesama pendamping	99	Tinggi	Pendamping perhutanan di Provinsi Maluku belum sepenuhnya
	2. Saling percaya antara pendamping dengan KPS yang didampingi	97	Tinggi	
	3. Pendamping memiliki sikap yang jujur	99	Tinggi	

	4. Kerja sama yang baik antara sesama pendamping	93	Tinggi	menerapkan secara optimal pada unsur kepercayaan
	5. Saling memberikan pendapat atau masukan terhadap sesama pendamping	63	Sedang	
	6. Memiliki sifat terbuka satu dengan yang lain	87	Tinggi	
Norma Sosial	7. Memiliki sifat taat terhadap aturan	97	Tinggi	Pendamping
	8. Tidak berlaku curang	99	Tinggi	perhutanan sosial di
	9. Berlaku adil pada sesama pendamping	98	Tinggi	Provinsi Maluku telah
	10. Berlaku adil pada anggota kelompok yang didampingi	98	Tinggi	menerapkan secara optimal pada unsur norma sosial
Jaringan Sosial	11. Komunikasi yang baik dengan kelompok yang didampingi	89	Tinggi	Pendamping
	12. Komunikasi yang baik dengan pemerintah, swasta dan lainnya	64	Sedang	perhutanan di Provinsi Maluku
	13. Saling membantu dengan pendamping lainnya	97	Tinggi	belum sepenuhnya menerapkan secara optimal pada unsur jaringan sosial
Total		1.180		

**Sumber:** Data primer, 2022

*Skor Seluruh Kriteria =*

*Capaian Skor x Jumlah Responden x Instrumen Pertanyaan*

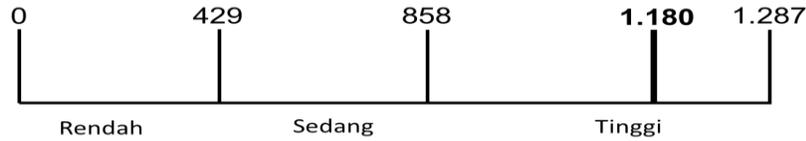
$$S3 = 3 \times 33 \times 13 = 1.287$$

$$S2 = 2 \times 33 \times 13 = 858$$

$$S1 = 1 \times 33 \times 13 = 429$$

Berdasarkan dianalisis menggunakan skala likert, maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan (Suwandi et al., 2018) yaitu rendah (0-429), sedang (430-858) dan tinggi (859-1.287).

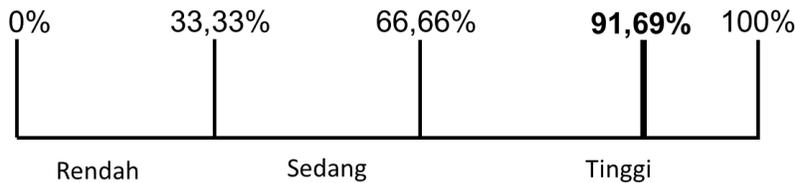
Gambar 3 menunjukkan skor pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan sosial sebesar 1.180 atau kategori tinggi.



**Gambar 3.** Skor pengaruh modal sosial dalam pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku

Tingkat pengaruh modal sosial dapat dirumuskan dengan indeks sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Perumusan ini dinyatakan oleh Riduwan (2009) dan Rumajit et al. (2019). Indeks 91,69% dengan skor total 1.180, menunjukkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang penting dalam pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku. Keberhasilan pendampingan perhutanan sosial dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

$$\text{Tingkat Pengaruh Modal Sosial} = \frac{\text{Skor Hasil Pengumpulan Data}}{\text{Skor Ideal (Tertinggi)}} \times 100\%$$



**Gambar 4.** Tingkat pengaruh modal sosial pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku

Beberapa penelitian terkait modal sosial menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat membutuhkan tingkat modal sosial tertentu untuk pengelolaan hutan lestari (Lee et al., 2017; Dako et al., 2019). Hasil penelitian lainnya dikemukakan bahwa modal sosial berperan positif dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan untuk mendorong masyarakat mengelola hutan secara lestari (Puspita et al., 2020). Lebih lanjut, penelitian di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa penguatan modal sosial dalam dimensi kepercayaan, norma, dan jaringan akan mendorong kemandirian petani hutan dan kelompok tani hutan dalam pengelola hutan (Sylviani et al., 2020).

Berdasarkan evaluasi kinerja, sikap dan perilaku (disiplin, kejujuran dan kerja sama) pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Balai PSKL Wilayah Maluku-Papua bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Maluku, dan KPH menunjukkan hasil evaluasi 81,82% atau 27 pendamping dalam kategori baik dan 18,18%

atau 6 pendamping dalam kategori buruk (Tabel 18). Evaluasi kinerja, sikap dan perilaku pendamping perhutanan sosial dimaksud dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan perpanjangan penugasan pendamping untuk tahun berikutnya. Seorang pendamping yang dinilai dalam kategori buruk maka penugasan tidak akan dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Standar evaluasi pendamping perhutanan sosial yaitu kinerja pendamping (70%) meliputi penilaian dalam penyusunan rencana kerja pendampingan, laporan bulanan dan tahunan, administrasi keuangan, pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam 3 (tiga) tata kelola perhutanan sosial, dan pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik. Sedangkan evaluasi terhadap sikap dan perilaku (30%) meliputi penilaian kedisiplinan, kejujuran, dan kerja sama.

Membandingkan hasil penelitian indeks tingkat pengaruh modal sosial pendampingan perhutanan sosial yaitu 91,69% dengan hasil evaluasi kinerja, sikap dan perilaku pendamping yaitu 81,82%, menunjukkan persentase tidak jauh berbeda yaitu 9,87%. Dengan demikian, pengaruh modal sosial terhadap pendampingan perhutanan sosial secara positif mempengaruhi tingkat kinerja, sikap dan perilaku pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku.

**Tabel 18.** Evaluasi pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku, 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping	Kinerja, Sikap dan Prilaku dalam Kategori Baik	Kinerja, Sikap dan Prilaku dalam Kategori Buruk
1	Buru	1	1	-
2	Buru Selatan	4	3	1
3	Ambon	3	3	-
4	Maluku Tengah	5	4	1
5	Maluku Tenggara	3	2	1
6	Seram Bagian Barat	12	9	3
7	Seram Bagian Timur	4	4	-
8	Tual	1	1	-
	Total	33	27	6

**Sumber:** Balai PSKL Maluku-Papua, 2022

#### 4. KESIMPULAN

Modal sosial yang meliputi kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial dengan 13 indikator penilaian menunjukkan angka indeks 91,69% dan dikategorikan dalam penilaian tinggi dengan skor total 1.180. Indeks ini menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki pendamping perhutanan sosial di Provinsi Maluku meskipun belum sepenuhnya diterapkan secara optimal atau tidak mencapai

100%, namun telah menunjukkan pengaruh positif dalam penerapan pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Maluku. Pengaruh modal sosial terhadap pendampingan secara jelas terlihat dari hasil evaluasi kinerja, sikap dan perilaku pendamping dengan nilai 81,82% dalam kategori baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N., Kaskoyo, H., & Qurniati, R. (2020). *Modal manusia dan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Pematang Neba Kabupaten Tanggamus*. In *Prosiding Seminar Nasional Konservasi 2020*. Retrieved from
- A Zulkarnain, A. (2021). *Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau*. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 172–188.
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, BPSKL (2022). *Laporan Pendampingan Perhutanan Sosial Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku-Papua Tahun 2022*.
- Dako, F. X., Purwanto, R. H., Faida, L. R. W., & Sumardi. (2019). *Community's social capital in the management of Mutis Timau protected forest in Timor island, Indonesia*. *Biodiversitas*, 20(8), 2177–2187.
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, PSKL (2020). *Rencana Strategis Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2020 – 2024*. Jakarta, September 2020.
- Fathy, R. (2019) *Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat*. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2),35–53.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK (2022). *SIARAN PERS Nomor: SP. 202/HUMAS/PPIP/HMS.3/07/2022*.
- Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). *Measuring social capital in Indonesian community forest management*. *Forest Science and Technology*, 13(3), 133–141.
- Mahfud, T., Triyono, M.B., Sudira, P., & Mulyani, Y. (2020). *The influence of social capital and entrepreneurial attitudeorientation on entrepreneurial intentions: the mediating role ofpsychological capital*.*European Research on Management and Business Economics* 26 (2020) 33–39.
- Puspita, N. T., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2020). *Social Capital of Community Forest Management in Batutegi Forest Management Unit*. *Jurnal Sylva Lestari*, 8(1), 54.
- Riduwan. (2009). *Dasar-Dasar Statistik*, Bandung: Alfabeta. ISBN 979-8433-08-4
- Rumagit, J. ., Timban, J. F. J., & Ngangi, C. R. (2019). *Peranan Modal Sosial Pada Kelompok Tani Padi Sawah di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan*. *Agri-Sosioekonomi*, 15(3), 453.



*Suwandi, E., Imansyah, F. H., & Dasril, H. (2018). Analisis Tingkat Kepuasan Menggunakan Skala Likert pada Layanan Speedy yang Bermigrasi ke Indihome. Jurnal Teknik Elektro, 11.*

*Sylviani, Suka, A. P., Surati, & Kurniasari, D. R. (2020). Social capital in managing community plantation forest: A case study at kph boalemo, gorontalo province. Indonesian Journal of Forestry Research, 7(1), 71–82.*